



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/871/M.AA.05/2018
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

31 Desember 2018

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjung Pinang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **72,48** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang baik.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
a.	Perencanaan Kinerja	35	23,94	23,97
b.	Pengukuran Kinerja	20	18,38	18,88
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,57	11,59
d.	Evaluasi Internal	10	7,05	6,39
e.	Capaian Kinerja	20	10,18	11,65
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,12	72,48
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Beberapa catatan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Manajemen Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami peningkatan, penerapan manajemen kinerja mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial untuk mengambil langkah-langkah perbaikan;
2. Penjabaran kinerja (*cascade down*) telah dilakukan melalui penyusunan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sampai ke level eselon IV, namun belum seluruhnya menunjukkan hubungan causalitas kinerja dengan kinerja level di atasnya;
3. Laporan Kinerja telah disusun sampai level OPD, namun masih banyak Laporan Kinerja OPD yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, Laporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerjanya dan belum mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap OPD;
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah memanfaatkan teknologi untuk monitoring capaian kinerja, namun belum dapat dijadikan sarana untuk perencanaan dan penganggaran kinerja;
5. Evaluasi atas program yang dilakukan oleh sebagian besar OPD baru sebatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil program.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sampai ke individu pegawai;
2. Melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran agar dapat meningkatkan penerapan manajemen kinerja efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;
3. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi pada setiap OPD, yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program, dan efisiensi anggaran;
4. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai ukuran pemberian reward and punishment;
5. Memerintahkan Inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Syaruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri.